

RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan indikator kinerja (Cara pengukuran, sumber data dan keterangan lainnya)	Rencana Aksi	Target TW I		Anggaran	Dana yang Diperlukan pada TW I	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
I	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Secara Transparan, Efisien, dan Akuntabel	1	Opini BPK atas LKPD	WTP	Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dapat mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa di lembaga tersebut tata kelola pemerintahan berjalan baik, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya bagus. Opini pun dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah dan akan berpengaruh pada kredibilitas entitas tersebut. Opini BPK didasarkan pada kriteria antara lain : Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI).... BPK menggunakan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini BPK tidak dihitung dalam bentuk angka, melainkan berupa pernyataan profesional	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Penatausahaan Pembiayaan Daerah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Opini BPK atas LKPD 1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (Persentase) 2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase) Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen) Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen) Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen) Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen) Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen) Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen) Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen) 1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase) 2. Persentase Penurunan SILPA (Persentase) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	WTP 30% 40% 2 2 30 30 2 2 1 100% 12 1 2	4.870.867.125,00 3.788.333.209,00 706.270.000,00 696.425.200,00 33.589.100,00 87.474.900,00 802.577.109,00 849.513.900,00 612.483.000,00 247.667.200,00 38.719.500,00 8.790.300,00 43.634.400,00	958.353.320,00 567.320.116,00 20.000.000,00 100.000.000,00 14.800.000,00 50.999.900,00 119.099.216,00 85.388.000,00 177.033.000,00 96.347.300,00 7.100.000,00 5.090.300,00 15.408.600,00	 Januari s/d Maret Januari s/d Maret Januari s/d Maret Januari s/d Maret Januari s/d Maret	 Bidang Anggaran Bidang Perbendaharaan

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan indikator kinerja (Cara pengukuran, sumber data dan keterangan lainnya)	Rencana Aksi	Target TW I		Anggaran	Dana yang Diperlukan pada TW I	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
					pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, dengan melihat Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Efektivitas Sistem Pengendalian Interen. Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dapat mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa di lembaga tersebut tata kelola pemerintahan berjalan baik, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya bagus. Opini pun dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah dan akan berpengaruh pada kredibilitas entitas tersebut. Opini BPK didasarkan pada kriteria antara lain : Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI)...., BPK menggunakan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFFK) (Laporan)	12	24.367.700,00	5.000.000,00	Januari s/d Maret	
						Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	12	26.881.100,00	5.000.000,00	Januari s/d Maret	
						Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	30	105.274.200,00	58.748.400,00	Januari s/d Maret	
						Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (Persen)	100%	775.640.716,00	294.685.904,00		Bidang Akuntansi
						Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	30	41.136.100,00	13.738.600,00	Januari s/d Maret	
						Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	55.072.516,00	15.652.604,00	Januari s/d Maret	
						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	496.211.900,00	202.500.000,00	Januari s/d Maret	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	1	24.351.200,00	9.351.200,00		
						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	30	91.087.000,00	36.498.000,00	Januari s/d Maret	
						Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	15	67.782.000,00	16.945.500,00	Januari s/d Maret	

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan indikator kinerja (Cara pengukuran, sumber data dan keterangan lainnya)	Rencana Aksi	Target TW I		Anggaran	Dana yang Diperlukan pada TW I	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
					Opini BPK tidak dihitung dalam bentuk angka, melainkan berupa pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, dengan melihat Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Efektivitas Sistem Pengendalian Interen.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Sistem terintegrasi	6 Bidang pengelolaan	59.226.000,00	736.752.904,00		
						Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1	59.226.000,00	46.226.000,00	Januari s/d Maret	
						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK atas LKPD	100%	1.840.288.632,00			Bidang Pengelolaan BMD
						Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	100%	1.840.288.632,00			
						Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	58.805.900,00	32.228.200,00	Januari s/d Maret	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	5.765.000,00	2.500.000,00	Januari s/d Maret	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12	1.151.553.200,00	400.131.800,00	Januari s/d Maret	
						Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	1	348.761.800,00	232.310.800,00		
						Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1	131.475.516,00	23.356.104,00	Januari s/d Maret	
						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	10.943.500,00	10.943.500,00	Januari s/d Maret	
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	90.991.016,00	21.399.804,00	Januari s/d Maret	
						Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	60	41.992.700,00	36.992.700,00		
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Opini BPK atas LKPD	100%	2.101.491.750,00	749.683.000,00		Bidang Pendapatan
						Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah 2. Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan 3. Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	12% 100% 100%	2.101.491.750,00	749.683.000,00		
						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	97.726.600,00	97.726.600,00	Januari s/d Maret	
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	2	144.031.900,00	59.602.500,00	Januari s/d Maret	

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan indikator kinerja (Cara pengukuran, sumber data dan keterangan lainnya)	Rencana Aksi	Target TW I		Anggaran	Dana yang Diperlukan pada TW I	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	63.414.300,00	25.500.000,00	Januari s/d Maret	
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	15	118.022.900,00	35.005.000,00	Januari s/d Maret	
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	358.560.700,00	110.634.300,00	Januari s/d Maret	
						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek Pajak)	7500	58.740.700,00	53.100.000,00	Januari s/d Maret	
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	12	191.439.000,00	40.147.000,00	Januari s/d Maret	
						Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1	888.883.550,00	262.212.800,00	Januari s/d Maret	
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	1	166.257.300,00	52.900.000,00	Januari s/d Maret	
						Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	14.414.800,00	12.854.800,00	Januari s/d Maret	



**RENCANA AKSI TRIWULAN II TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI**

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan indikator kinerja (Cara pengukuran, sumber data dan keterangan lainnya)	Rencana Aksi	Target TW II		Anggaran	Dana yang Diperlukan pada TW II	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
I	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Secara Transparan, Efisien, dan Akuntabel	1	Opini BPK atas LKPD	WTP	Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dapat mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa di lembaga tersebut tata kelola pemerintahan berjalan baik, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya bagus. Opini pun dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah dan akan berpengaruh pada kredibilitas entitas tersebut. Opini BPK didasarkan pada kriteria antara lain : Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI)...., BPK menggunakan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini BPK tidak dihitung dalam bentuk angka, melainkan berupa pernyataan profesional	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Penatausahaan Pembiayaan Daerah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Opini BPK atas LKPD 1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru uyang dialokasikan melalui TKD (Persentase) 2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase) Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen) Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen) Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen) Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen) Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen) Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen) Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen) 1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase) 2. Persentase Penurunan SILPA (Persentase) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	WTP 30% 40% 2 2 30 30 2 2 1 100% 12 1 2	4.870.867.125,00 3.788.333.209,00 706.270.000,00 696.425.200,00 33.589.100,00 87.474.900,00 802.577.109,00 849.513.900,00 612.483.000,00 247.667.200,00 38.719.500,00 8.790.300,00 43.634.400,00	942.816.204,00 630.114.600,00 71.935.000 269.125.200 18.789.100 6.875.000 98.500.000 44.890.300 120.000.000 64.557.800,00 16.619.500 - 9.408.600	 April s/d Juni April s/d Juni April s/d Juni April s/d Juni April s/d Juni April s/d Juni	 Bidang Anggaran Bidang Perbendaharaan

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan indikator kinerja (Cara pengukuran, sumber data dan keterangan lainnya)	Rencana Aksi	Target TW II		Anggaran	Dana yang Diperlukan pada TW II	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
					pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, dengan melihat Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Efektivitas Sistem Pengendalian Interen. Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dapat mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa di lembaga tersebut tata kelola pemerintahan berjalan baik, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya bagus. Opini pun dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah dan akan berpengaruh pada kredibilitas entitas tersebut. Opini BPK didasarkan pada kriteria antara lain : Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI)...., BPK menggunakan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	12	24.367.700,00	5.300.000	April s/d Juni	
						Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	12	26.881.100,00	13.071.100	April s/d Juni	
						Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	30	105.274.200,00	20.158.600	April s/d Juni	
						Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (Persen)	100%	775.640.716,00	248.143.804,00		Bidang Akuntansi
						Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	30	41.136.100,00	9.132.500	April s/d Juni	
						Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	55.072.516,00	4.899.804	April s/d Juni	
						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	496.211.900,00	201.941.000	April s/d Juni	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	1	24.351.200,00	5.000.000	April s/d Juni	
						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	30	91.087.000,00	10.225.000	April s/d Juni	
						Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	15	67.782.000,00	16.945.500	April s/d Juni	

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan indikator kinerja (Cara pengukuran, sumber data dan keterangan lainnya)	Rencana Aksi	Target TW II		Anggaran	Dana yang Diperlukan pada TW II	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
					Opini BPK tidak dihitung dalam bentuk angka, melainkan berupa pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, dengan melihat Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Efektivitas Sistem Pengendalian Interen.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Sistem terintegrasi	6 Bidang pengelolaan	59.226.000,00	421.843.504,00		
						Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1	59.226.000,00	13.000.000	April s/d Juni	
						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK atas LKPD	100%	1.840.288.632,00			Bidang Pengelolaan BMD
						Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	100%	1.840.288.632,00			
						Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	58.805.900,00	18.250.000	April s/d Juni	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	5.765.000,00	2.642.300	April s/d Juni	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12	1.151.553.200,00	240.100.400	April s/d Juni	
						Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	1	348.761.800,00	71.451.000	April s/d Juni	
						Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1	131.475.516,00	76.399.804	April s/d Juni	
						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	10.943.500,00	-	April s/d Juni	
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	90.991.016,00	36.641.604	April s/d Juni	
						Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	60	41.992.700,00	5.000.000		
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Opini BPK atas LKPD	100%	2.101.491.750,00	498.878.200,00		Bidang Pendapatan
						Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah 2. Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan 3. Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	12% 100% 100%	2.101.491.750,00	498.878.200,00		
						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	97.726.600,00	-	April s/d Juni	
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	2	144.031.900,00	25.629.400	April s/d Juni	

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan indikator kinerja (Cara pengukuran, sumber data dan keterangan lainnya)	Rencana Aksi	Target TW II		Anggaran	Dana yang Diperlukan pada TW II	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	63.414.300,00	23.088.000		
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	15	118.022.900,00	33.155.000	April s/d Juni	
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	358.560.700,00	101.404.800	April s/d Juni	
						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek Pajak)	7500	58.740.700,00	3.547.000	April s/d Juni	
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	12	191.439.000,00	32.500.000	April s/d Juni	
						Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1	888.883.550,00	215.600.000	April s/d Juni	
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	1	166.257.300,00	62.394.000	April s/d Juni	
						Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	14.414.800,00	1.560.000	April s/d Juni	

Bukittinggi, 12 Januari 2026
KEPALA BADAN KEUANGAN

ELOHANSEN PANJAITAN
NIP. 197308172000031008

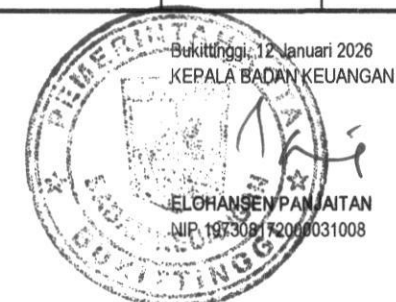
RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI

[illegible]

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan indikator kinerja (Cara pengukuran, sumber data dan keterangan lainnya)	Rencana Aksi	Target TW III		Anggaran	Dana yang Diperlukan pada TW III	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
					pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, dengan melihat Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Efektivitas Sistem Pengendalian Interen. Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dapat mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa di lembaga tersebut tata kelola pemerintahan berjalan baik, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya bagus. Opini pun dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah dan akan berpengaruh pada kredibilitas entitas tersebut. Opini BPK didasarkan pada kriteria antara lain : Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI)...., BPK menggunakan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	12	24.367.700,00	9.067.700	Juli s/d September	
						Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	12	26.881.100,00	5.000.000	Juli s/d September	
						Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	30	105.274.200,00	16.758.600	Juli s/d September	
						Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (Persen)	100%	775.640.716,00	175.151.204,00		Bidang Akuntansi
						Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	30	41.136.100,00	9.132.500	Juli s/d September	
						Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	55.072.516,00	29.620.304	Juli s/d September	
						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	496.211.900,00	91.770.900	Juli s/d September	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	1	24.351.200,00	5.500.000	Juli s/d September	
						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	30	91.087.000,00	22.182.000	Juli s/d September	
						Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	15	67.782.000,00	16.945.500	Juli s/d September	

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan indikator kinerja (Cara pengukuran, sumber data dan keterangan lainnya)	Rencana Aksi	Target TW III		Anggaran	Dana yang Diperlukan pada TW III	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
					Opini BPK tidak dihitung dalam bentuk angka, melainkan berupa pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, dengan melihat Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Efektivitas Sistem Pengendalian Interen.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Sistem terintegrasi	6 Bidang pengelolaan	59.226.000,00	357.745.204,00		
						Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1	59.226.000,00	-	Juli s/d September	
						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK atas LKPD	100%	1.840.288.632,00			Bidang Pengelolaan BMD
						Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	100%	1.840.288.632,00			
						Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	58.805.900,00	8.327.700	Juli s/d September	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	5.765.000,00	622.700	Juli s/d September	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12	1.151.553.200,00	306.225.000	Juli s/d September	
						Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	1	348.761.800,00	22.500.000	Juli s/d September	
						Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1	131.475.516,00	20.069.804	Juli s/d September	
						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	10.943.500,00	-	Juli s/d September	
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	90.991.016,00	28.049.804	Juli s/d September	
						Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	60	41.992.700,00	-	Juli s/d September	
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Opini BPK atas LKPD	100%	2.101.491.750,00	673.673.200,00		Bidang Pendapatan
						Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah 2. Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan 3. Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	12% 100% 100%	2.101.491.750,00	673.673.200,00		
						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	97.726.600,00	-	Juli s/d September	
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	2	144.031.900,00	48.500.000	Juli s/d September	

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan indikator kinerja (Cara pengukuran, sumber data dan keterangan lainnya)	Rencana Aksi	Target TW III	Anggaran	Dana yang Diperlukan pada TW III	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	63.414.300,00	14.826.300	
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	15	118.022.900,00	39.789.100	Juli s/d September
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	358.560.700,00	93.725.800	Juli s/d September
						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek Pajak)	7500	58.740.700,00	2.093.700	Juli s/d September
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	12	191.439.000,00	114.969.000	Juli s/d September
						Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1	888.883.550,00	314.790.000	Juli s/d September
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	1	166.257.300,00	44.979.300	Juli s/d September
						Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	14.414.800,00	-	Juli s/d September



**RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI**

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan indikator kinerja (Cara pengukuran, sumber data dan keterangan lainnya)	Rencana Aksi	Target TW IV		Anggaran	Dana yang Diperlukan pada TW IV	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Secara Transparan, Efisien, dan Akuntabel	1	Opini BPK atas LKPD	WTP	Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dapat mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa di lembaga tersebut tata kelola pemerintahan berjalan baik, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya bagus. Opini pun dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah dan akan berpengaruh pada kredibilitas entitas tersebut. Opini BPK didasarkan pada kriteria antara lain : Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI)...., BPK menggunakan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini BPK tidak dihitung dalam bentuk angka, melainkan berupa pernyataan profesional	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK atas LKPD	WTP	4.870.867.125,00	963.661.797,00		
						Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru uyang dialokasikan melalui TKD (Persentase) 2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	30% 40%	3.788.333.209,00	873.174.793,00		Bidang Anggaran
						Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	706.270.000,00	-		
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	696.425.200,00	227.300.000		
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	30	33.589.100,00	-	Oktober s/d Desember	
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	30	87.474.900,00	-	Oktober s/d Desember	
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	802.577.109,00	430.424.793	Oktober s/d Desember	
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	849.513.900,00	-	Oktober s/d Desember	
						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1	612.483.000,00	215.450.000	Oktober s/d Desember	
						Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase) 2. Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	100%	247.667.200,00	32.827.200,00		Bidang Perbendaharaan
						Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	38.719.500,00	5.000.000	Oktober s/d Desember	
						Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	1	8.790.300,00	-	Oktober s/d Desember	
						Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	2	43.634.400,00	9.408.600	Oktober s/d Desember	

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan indikator kinerja (Cara pengukuran, sumber data dan keterangan lainnya)	Rencana Aksi	Target TW IV		Anggaran	Dana yang Diperlukan pada TW IV	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
					<p>pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, dengan melihat Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Efektivitas Sistem Pengendalian Interen. Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dapat mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa di lembaga tersebut tata kelola pemerintahan berjalan baik, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya bagus. Opini pun dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah dan akan berpengaruh pada kredibilitas entitas tersebut. Opini BPK didasarkan pada kriteria antara lain :</p> <p>Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan</p> <p>Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)</p> <p>Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI)...., BPK menggunakan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).</p>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	12	24.367.700,00	5.000.000	Oktober s/d Desember	
						Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	12	26.881.100,00	3.810.000	Oktober s/d Desember	
						Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	30	105.274.200,00	9.608.600	Oktober s/d Desember	
						Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (Persen)	100%	775.640.716,00	57.659.804,00		Bidang Akuntansi
						Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	30	41.136.100,00	9.132.500	Oktober s/d Desember	
						Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	55.072.516,00	4.899.804	Oktober s/d Desember	
						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	496.211.900,00	-		
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	1	24.351.200,00	4.500.000	Oktober s/d Desember	
						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	30	91.087.000,00	22.182.000	Oktober s/d Desember	
						Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	15	67.782.000,00	16.945.500	Oktober s/d Desember	

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan indikator kinerja (Cara pengukuran, sumber data dan keterangan lainnya)	Rencana Aksi	Target TW IV		Anggaran	Dana yang Diperlukan pada TW IV	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
					Opini BPK tidak dihitung dalam bentuk angka, melainkan berupa pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, dengan melihat Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Efektivitas Sistem Pengendalian Interen.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Sistem terintegrasi	6 Bidang pengelolaan	59.226.000,00	239.245.804,00		
						Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1	59.226.000,00	-		
						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK atas LKPD	100%	1.840.288.632,00			Bidang Pengelolaan BMD
						Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	100%	1.840.288.632,00			
						Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	58.805.900,00	-	Oktober s/d Desember	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	5.765.000,00	-		
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12	1.151.553.200,00	205.096.000	Oktober s/d Desember	
						Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	1	348.761.800,00	22.500.000	Oktober s/d Desember	
						Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1	131.475.516,00	11.649.804	Oktober s/d Desember	
						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	10.943.500,00	-	0	
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	90.991.016,00	4.899.804	Oktober s/d Desember	
						Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	60	41.992.700,00	-	0	
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Opini BPK atas LKPD	100%	2.101.491.750,00	179.257.350,00		Bidang Pendapatan
						Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah 2. Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan 3. Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	12% 100% 100%	2.101.491.750,00	179.257.350,00		
						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	97.726.600,00	-	Oktober s/d Desember	
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	2	144.031.900,00	10.300.000		

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan indikator kinerja (Cara pengukuran, sumber data dan keterangan lainnya)	Rencana Aksi	Target TW IV		Anggaran	Dana yang Diperlukan pada TW IV	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	63.414.300,00	-	Oktober s/d Desember	
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	15	118.022.900,00	10.073.800	Oktober s/d Desember	
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	358.560.700,00	52.795.800	Oktober s/d Desember	
						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek Pajak)	7500	58.740.700,00	-	Oktober s/d Desember	
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	12	191.439.000,00	3.823.000	Oktober s/d Desember	
						Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1	888.883.550,00	96.280.750	Oktober s/d Desember	
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	1	166.257.300,00	5.984.000	Oktober s/d Desember	
						Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	14.414.800,00	-	Oktober s/d Desember	

Bukittinggi, 12 Januari 2026
KEPALA BADAN KEUANGAN


ELOHANSEN PANJAITAN
NIP 197308172000031008